



Lemahnya Kondisi Ekonomi Masyarakat Akibat Peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Tidak Tepat Sasaran

The Weak Economic Condition of the Community Due to Inappropriately Targeted People's Business Credit (KUR) Loans

**Rani Astria Silvera harahap¹, Mira Yanti Lubis², M. Luthfi hasibuan³, Nurhayani Lubis⁴
Hidayat nasution⁵, Putri juliana⁶**

Program Studi Perbankan syariah, Institut Agama Islam Padang Lawas

Email: Harahap89@gmail.com², myantilubis87@gmail.com², luthfihassibuan074@gmail.com³

Nurhayani12@gmail.com⁴, hidayatnasution35@gmail.com⁵, Putrijuliana4444@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 08-07-2025

Revised : 09-07-2025

Accepted : 11-08-2025

Published : 13-08-2025

Abstract

This community service activity aims to improve financial literacy and evaluate the effectiveness of the People's Business Credit (KUR) program at the village level. Survey results show that all respondents (100%) were aware of the KUR program, and most had accessed it. However, used the funds for daily needs rather than for business capital as intended. As a result, the majority reported a decline in their economic condition and difficulty in repaying the loan. Respondents also perceived that the program was not well-targeted, with many recipients lacking clear business plans. This activity had a positive impact by raising awareness of the importance of financial planning and productive use of funds. However, limitations such as limited participant reach and lack of follow-up training remain challenges. Therefore, strict verification, pre-disbursement training, and business mentoring are recommended to ensure the effectiveness and targeting accuracy of KUR as a tool for community economic empowerment.

Keywords: *Community economy, Economic development, People's Business credit (KUR)*

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tingkat desa. Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) telah mengetahui program KUR dan sebagian besar masyarakat telah mengaksesnya. Namun, berdasarkan survey menunjukkan bahwa sebagian dari mereka menggunakan dana KUR untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk modal usaha sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya, mayoritas responden merasa kondisi ekonomi mereka memburuk, serta mengalami kesulitan dalam membayar cicilan. Selain itu, responden juga menilai penyaluran KUR belum tepat sasaran karena banyak diberikan kepada individu tanpa rencana usaha yang jelas. Kegiatan ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan dan penggunaan dana secara produktif. Kendati demikian, keterbatasan berupa minimnya jangkauan peserta dan kurangnya tindak lanjut berupa pelatihan usaha masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya verifikasi ketat, pelatihan prapencairan, serta pendampingan usaha untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program KUR sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: *Ekonomi masyarakat, Peminjaman, Kredit Usaha Rakyat*

PENDAHULUAN

Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk



berprofesi sebagai petani, pedagang kecil, dan Ibu rumah tangga. Kelompok ibu-ibu PKK di desa ini memiliki peran penting dalam membantu perekonomian keluarga, baik melalui kegiatan sosial maupun usaha berskala kecil. Dalam upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, kami tim pengabdian kepada masyarakat mengadakan kegiatan sosialisasi pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia (BSI).

Namun, selama berlangsungnya sosialisasi tersebut, banyak peserta yang justru lebih tertarik dan aktif bertanya mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dari sisi persyaratan, tujuan penggunaannya, maupun risiko dan dampaknya. Hal ini membuka fakta bahwa masih banyak ibu-ibu PKK yang belum memahami secara utuh tentang fungsi KUR, termasuk kesalahan umum dalam pemanfaatannya. Beberapa di antaranya bahkan mengaku telah menggunakan KUR bukan untuk Modal usaha tetapi untuk konsumsi rumah tangga atau kebutuhan mendesak lainnya, yang pada akhirnya membebani mereka secara finansial dan memperlemah stabilitas ekonomi keluarga.

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan konkret terkait rendahnya literasi keuangan, khususnya dalam memahami, mengakses, dan memanfaatkan pinjaman seperti KUR. Permasalahan ini didefinisikan sebagai ketidaktepatan penggunaan pinjaman dengan kegunaan yang seharusnya mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, tetapi justru menjadi beban karena kurangnya pemahaman dan pendampingan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa apabila ibu-ibu PKK diberikan pengetahuan yang memadai serta pelatihan pengelolaan keuangan dan usaha, maka mereka akan mampu memanfaatkan KUR secara tepat sasaran.

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK Desa Tanjung Baringin Simarulak mengenai fungsi dan penggunaan KUR secara bijak dan produktif, serta memperkenalkan prinsip dasar manajemen keuangan. Setelah kegiatan ini, diharapkan para peserta mampu membedakan penggunaan kredit konsumtif dan produktif, menyusun rencana usaha sederhana, serta lebih selektif dan cermat dalam mengambil keputusan finansial.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan definisi ini, maka yang disebut dengan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan

Masalah kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga seberapa dalam dan parahnya kemiskinan tersebut. Dengan mengetahui dimensi kedalam kemiskinan dan keparahan kemiskinan, pemerintah Indonesia melalui inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 yang berisi tentang kebijakan-kebijakan dalam pengembangan sektor Riil juga pemberdayaan Usaha UMKM Kecil dan Menengah yang disertai dengan kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, perbankan juga perusahaan penjamin kredit ataupun pembiayaan kepada UMKM Kecil dan Menengah. Pada tanggal 05 November 2007, dimana presiden Indonesia pada waktu itu melakukan peresmian kredit bagi Usaha UMKM Kecil dan Menengah dengan penjamin nama kredit adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peresmian tersebut juga didukung dengan inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang fokus pada program ekonomi 2008-2009 untuk melakukan penjaminan ataupun percepatan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.



Beberapa pembahasan diantaranya dengan penyelesaian terhadap kredit bermasalah bagi UMKM Kecil dan Menengah juga pemberitahuan kredit UMKM Kecil dan Menengah dengan nominal sampai dengan Rp. 500.000.000. Inpres tersebut juga didukung oleh peraturan menteri keuangan No. 135/pmk.05/2008 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan No. 1259/pmk.05/ 2011 tentang fasilitas penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk mengetahui Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut berjalan sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan tahapan-tahapan proses yang telah ditentukan, dilihat dari pencapaian target yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk membantu bagi UMKM Kecil dan Menengah ataupun masyarakat pemerintah bekerja sama dengan badan usaha milik pemerintah agar mudah untuk melakukan kontrol terhadap hasil yang didapatkan.

Inpres tersebut dijalankan dengan ditandai oleh ditanda tangannya sebuah nota kesepahaman bersama (*Memorandum of Understanding*) antara pemerintah, lembaga penjamin juga perbankan terhadap penjamin kredit pembiayaan UMKM Kecil dan Menengah dan koperasi atau lebih sering dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini disalurkan bagi UMKM Kecil dan Menengah yang kiranya memerlukan dana modal tambahan bagi usaha yang sedang dijalankan. Ketika program berjalan pihak penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan memastikan apakah program tersebut sudah berjalan secara produktif atau efektif sehingga terpenuhinya target yang telah ditentukan pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut.

Menurut (Jusuf, 2014) pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

Adapun pengertian kredit yang lain adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah harga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari – hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Dalam kehidupan sehari – hari, kata kredit merupakan perkataan yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di perkotaan tetapi sampai di pedesaan pun kredit sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sedangkan bagi dipinjamkan pasti kembali. Pengertian “kredit” merupakan Undang – Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu jenis kredit yang terbentuk dari hasil kerjasama dengan pemerintah. Kredit ini diberikan melalui bank sebagai kreditur atau penyedia dana untuk masyarakat yang ingin membangun usaha sendiri Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah kredit yang ditujukan bagi peminjam yang ingin merintis usaha sendiri tetapi masih dengan skala



mikro, kecil dan menengah. Pemerintah sendiri memiliki komitmen untuk membantu membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KUR sendiri pertama kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007. Tujuan diluncurkannya KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi dan untuk penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Sumber dananya adalah bank yang ditunjuk dengan tingkat bunga maksimum 16 % per tahun. Persentase kredit yang dijamin adalah 70 % dari alokasi total kredit yang disediakan oleh bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 tahun untuk investasi. Secara nasional penyaluran KUR banyak diarahkan ke sektor perdagangan, restoran dan hotel yang mencapai 55% dari total penyaluran KUR diikuti dengan penyaluran ke sektor pertanian sebesar 27% dan sektor-sektor lain sebesar 9%.

Persyaratan dan Proses pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) Proses pengajuan hingga pencairan adalah mengisi formulir permohonan kredit, penyerahan berkas-berkas, pemeriksaan berkas berkas, pemeriksaan ke lapangan, wawancara, keputusan kredit. perjanjian kredit dan pencairan kredit. Persyaratan pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) adalah usaha yang layak untuk dibiayai yang ditetapkan oleh Permenko. Syarat dokumen SIUP, NPWP, identitas diri beserta pasangan dan SHM/SHGB+IMB. Apabila nasabah yang melakukan top up maka cukup membawa rekening koran dan jaminan dinaikan peringkatnya.

Pola penjaminan KUR (KUR-lama) mencakup tiga skema, yaitu; (1) KUR Mikro dengan plafon sampai dengan Rp 20 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 22% per tahun, (2) KUR Ritel dengan plafon dari Rp 20 juta sampai dengan Rp 500 juta dikenakan suku bunga kredit maksimal 13% per tahun, (3) KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp 2 milyar. KUR Linkage biasanya menggunakan lembaga lain, seperti Koperasi, BPR, dan Lembaga Keuangan Non-bank, untuk meneruskan-pinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada UMKMK.

Pemerintah menghimbau bank-bank pelaksana KUR agar memperbanyak penyaluran KUR ke sektor pertanian, jangan terkonsentrasi di sektor perdagangan. Namun, hal ini sulit dipraktikkan bank pelaksana karena UMKM di sektor pertanian umumnya non-bankable sehingga bank lebih selektif menyeleksi calon nasabah. Sebaliknya UMKM yang bergerak di luar sektor pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa. Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat mendorong UMKM untuk akses ke lembaga keuangan melalui program KUR. Jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai lebih dari 50 juta unit usaha mungkin terbesar di dunia, akan tetapi penetrasi kredit di Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Menurut Kasmir (2012) tujuan pemberian kredit adalah (a) mencari keuntungan, (b) membantu usaha nasabah, (c) tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dan (d) membantu pemerintah. Sedangkan manfaat kredit bank menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2003) sebagai berikut:

1. Manfaat kredit bank bagi debitur
2. Manfaat kredit bagi bank



3. Manfaat kredit bagi pemerintah/Negara

Sedangkan tujuan pemberian kredit menurut Muchdarsyah Sinungan (2002), antara lain:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi dalam kredit bermasalah ini diakibatkan oleh adanya persepsi yang salah dikalangan pelaku UMKM mengenai sumber dana dalam penyaluran KUR. Mereka beranggapan bahwa dana KUR merupakan hibah dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan lagi. Penyebab lainnya karena persoalan rumah tangga yang mengakibatkan setiap individu debitur mengalami perubahan karakter. Semula pada saat dilakukannya penilaian pemberian kredit, debitur ini memiliki catatan dan riwayat yang baik dalam kegiatan pinjamnya. Maka dari itu, pihak bank memiliki keyakinan dalam memberikan kreditnya. Tetapi karena ada perubahan karakter tersebut, debitur ini menjadi sulit untuk membayar angsuran atau membayar kewajibannya tiap bulan dan mengakibatkan kredit bermasalah.

menggunakan Kredit Usaha Rakyat tidak sekaligus meningkatkan pendapatannya. Dan sebaliknya. Pelaku UMKM yang tidak menggunakan Kredit Usaha Rakyat tidak otomatis mengurangi pendapatan pengusaha UMKM, namun menggunakan modal pinjaman dari KUR memiliki resiko terhadap tidak terbayarnya Angsuran dan bunga yang dibebankan. Dan Semakin tinggi modal yang digunakan untuk tujuan investasi, semakin tinggi pendapatan dari pendapatan investasi Di sisi lain, jika modal sendiri relatif kecil, pendapatan dari bisnis akan lebih kecil. Pengembalian investasi yang dilakukan rendah. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan keuntungan oleh pelaku usaha, lebih baik untuk lebih meningkatkan modal investasi yang dibutuhkan Untuk mengatasi kendala modal, ekonom perlu menggunakan modal utang untuk meningkatkan nilai investasi mereka untuk memaksimalkan pendapatan mereka.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejatinya dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Namun, jika tidak dimanfaatkan dengan tepat, KUR justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan penerimanya, baik secara finansial maupun sosial. Beberapa pengaruh negatif dari penggunaan KUR yang tidak tepat antara lain:

1. Beban utang yang tidak produktif
2. Gagal bayar (kredit macet)
3. Tidak terjadi peningkatan ekonomi
4. Ketergantungan pada pinjaman
5. Stres dan konflik dalam keluarga
6. Citra buruk terhadap program KUR
7. Sulit mendapat akses kredit di masa depan



METODE PENGABDIAN

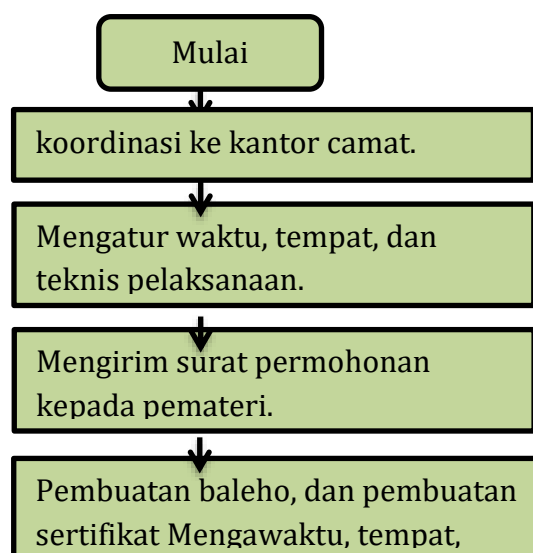
Subjek dari kegiatan pengabdian ini adalah ibu-ibu PKK Desa Tanjung Baringin Simarulak, Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis 31 Juli 2025 pukul 15.00 Wib hingga selesai, bertempat di Kantor Camat barumun selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 40 ibu PKK, yang terdiri dari pengurus dan anggota PKK. Keterlibatan peserta sangat aktif, terlihat dari antusiasme selama sosialisasi berlangsung, terutama pada sesi tanya jawab dan diskusi.

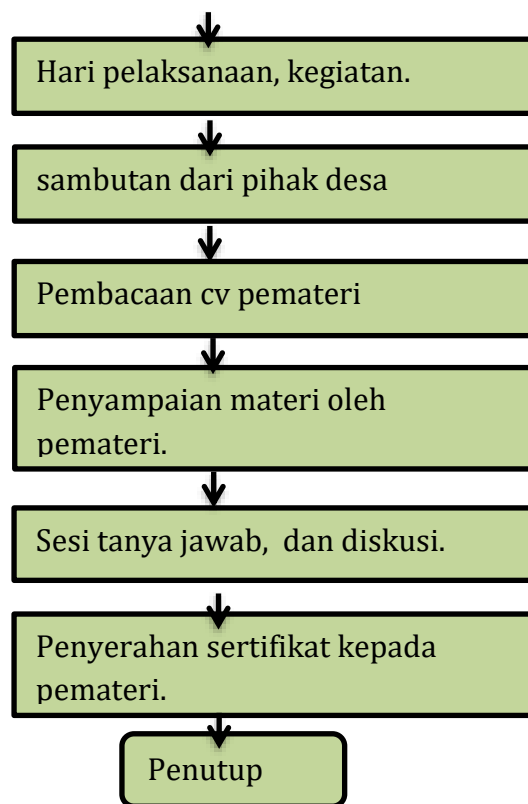
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah interaktif dan diskusi partisipatif. Materi utama adalah edukasi literasi keuangan, khususnya tentang pembukaan rekening di Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun, selama kegiatan berlangsung, mayoritas peserta justru mengajukan berbagai pertanyaan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dari aspek prosedur, pemanfaatan, maupun risiko penggunaan yang tidak tepat. Oleh karena itu, topik KUR kemudian diakomodasi dan menjadi bagian penting dalam sesi diskusi. Kegiatan ini menggunakan pendekatan responsif terhadap kebutuhan peserta, agar permasalahan yang nyata dihadapi masyarakat dapat direspons secara langsung dan solutif.

Proses kegiatan diawali dengan koordinasi kepada pihak Kecamatan Barumun Selatan untuk menentukan waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, tim pelaksana mengirimkan surat permohonan kepada narasumber (pemateri), menyiapkan media publikasi berupa baleho kegiatan, dan mencetak sertifikat untuk narasumber. Pada hari pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan sambutan dari pihak desa, dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber, pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, serta diakhiri dengan penyerahan sertifikat. Untuk mengevaluasi dampak kegiatan, satu minggu setelah acara berlangsung, tim menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada peserta untuk menggali persepsi dan pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas, khususnya terkait KUR.

Kegiatan ini bersifat ilmiah dan aplikatif karena didasarkan pada kebutuhan aktual masyarakat yang muncul secara langsung di lapangan, serta dikemas dalam metode yang memungkinkan peserta berpartisipasi aktif dan menyampaikan pengalaman mereka secara langsung. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif menggunakan data dari kuesioner yang dianalisis untuk melihat perubahan pemahaman peserta.

Berikut adalah alur kegiatan pengabdian yang digambarkan secara deskriptif dalam bentuk *flowchart*:





HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di kantor kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan diawali dengan proses koordinasi dengan pihak Kecamatan Barumun Selatan mengenai waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Setelah memperoleh persetujuan, tim pelaksana kemudian mengirimkan surat permohonan kepada narasumber/pemateri, kemudian membuat baliho kegiatan sebagai bentuk publikasi, serta mempersiapkan sertifikat penghargaan bagi pemateri.

Proses kegiatan diawali dengan koordinasi kepada pihak Kecamatan Barumun Selatan untuk menentukan waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, tim pelaksana mengirimkan surat permohonan kepada narasumber (pemateri), menyiapkan media publikasi berupa baliho kegiatan, dan mencetak sertifikat untuk narasumber. Pada hari pelaksanaan, kegiatan dimulai dengan sambutan dari pihak desa, dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber, pemaparan materi, sesi tanya jawab dan diskusi, serta diakhiri dengan penyerahan sertifikat.

Materi utama berupa sosialisasi pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dihadiri oleh ibu-ibu PKK. Meskipun materi utama difokuskan pada literasi perbankan syariah, dalam sesi tanya jawab muncul banyak pertanyaan mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pihak pemateri kemudian menyesuaikan penyampaian materi dengan fokus pada: (a) perbedaan antara kredit produktif dan konsumtif; (b) pentingnya mencatat anggaran rumah tangga; (c) bahaya BI Checking akibat kredit bermasalah; dan (d) alternatif pendanaan mikro berbasis



komunitas. Untuk mengevaluasi dampak kegiatan, satu minggu setelah acara berlangsung, tim menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form kepada Ibu-ibu PKK sebanyak 15 orang untuk menggali persepsi dan pemahaman mereka terhadap topik yang dibahas, khususnya terkait KUR.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Kuesioner GForm.

Uraian	Jumlah	Presentase	keterangan
Apakah Anda mengetahui tentang program Kredit Usaha Rakyat (KUR)	15 orang	100% menjawab iya	Menunjukkan bahwa KUR sudah terkenal dikalangan masyarakat
Apakah Anda pernah mengajukan pinjaman KUR?	15 orang	85,7% menjawab pernah dan 14,3% menjawab tidak pernah	Menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang menggunakan KUR apalagi bagi UMKM
Jika ya, tujuan utama Anda mengajukan KUR adalah	15 orang	71,4% menjawab kebutuhan sehari-hari, 14,3 tidak pernah dan 14,3 Modal usaha	Menunjukkan bahwa KUR lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari
Uraian	Jumlah	Presentase	keterangan
Menurut Anda, apakah KUR sering disalahgunakan untuk keperluan yang tidak sesuai tujuan awal	15 orang	71,4% menjawab setuju, 14,3 tidak setuju dan 14,3 tidak tahu	Hal ini menunjukkan bahwa KUR sering disalah gunakan untuk keperluan yang tidak sesuai
Bagaimana kondisi ekonomi Anda setelah menerima dana KUR	15 orang	85,7% menjawab menurun dan 14,3% menjawab tetap dan 6,3 menjawab tidak tahu	Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar setelah meminjam KUR kondisi ekonominya menurun
Apakah Anda kesulitan dalam membayar cicilan KUR	15 orang	71,4% menjawab iya, 14,3 tidak dan 14,3 tidak tahu	Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peminjam KUR mengalami kesulitan
Menurut Anda, siapa yang paling banyak menerima KUR di desa Anda	25 orang	71,4% menjawab pedagang, 19,3% petani dan 9,3% tidak tahu	Menunjukkan bahwa mayoritas pengaju KUR adalah pedagang
Uraian	Jumlah	Presentase	keterangan
Apakah Anda merasa program KUR di wilayah Anda sudah tepat sasaran	15 orang	71,4% menjawab Tidak , 14,3 iya dan 14,3 tidak tahu	Menunjukkan bahwa KUR belum tepat sasaran
Apa dampak utama dari penyaluran KUR yang tidak tepat sasaran menurut Anda	15 Orang	57,1% banyak masyarakat yang gagal bayar, 28,6% usaha tidak berkembang dan 14,3% menjawab tidak tahu	Menunjukkan bahwa banyak nasabah yang gagal atau tidak bisa membayar cicilan KUR
Menurut Anda, bagaimana cara memperbaiki sistem penyaluran KUR agar lebih tepat sasaran		57,1 % melakukan survey langsung ke lapangan, 28,6% memberikan pelatihan sebelum pencairan, 14,3 % menjawab melibatkan tokoh masyarakat untuk proses pencairan	Menunjukkan bahwa seharusnya pegawai bank melakukan survey sebagai bentuk pencegahan ketidak tepat sasaran

Pembahasan

Hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) telah mengetahui tentang program KUR, dan mayoritas dari mereka (85,7%) bahkan telah mengajukan pinjaman KUR. Namun, data yang mengejutkan adalah bahwa sebagian besar peminjam (71,4%) menggunakan dana KUR untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk modal usaha sebagaimana tujuan program



tersebut. Akibatnya, sebanyak 85,7% responden merasa kondisi ekonomi mereka justru menurun setelah menerima dana KUR, dan 71,4% mengaku mengalami kesulitan dalam membayar cicilan. Hal ini diperparah dengan temuan bahwa sebagian besar responden (71,4%) menilai penyaluran KUR belum tepat sasaran, karena banyak diberikan kepada penerima yang tidak memiliki rencana usaha yang jelas.

Hal ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam implementasi program KUR di tingkat akar rumput. Dalam teori pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, program bantuan seperti KUR seharusnya menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi produktif masyarakat. Namun, ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya pendampingan, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program menyebabkan dana KUR justru digunakan secara konsumtif. Hal ini selaras dengan pendapat Bourdieu dalam teori modal sosial, bahwa akses terhadap modal finansial tanpa diiringi peningkatan modal sosial dan kultural akan cenderung gagal meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

Selain itu, responden juga menyampaikan bahwa sebagian besar penerima KUR di desa mereka adalah pedagang kecil (71,4%), namun tanpa adanya pelatihan usaha atau pendampingan manajerial, dana KUR yang diterima tidak mampu meningkatkan usaha mereka. Sebanyak 57,1% responden mengusulkan agar pihak lembaga penyalur melakukan survei lapangan sebelum menyetujui pengajuan KUR, sementara 28,6% lainnya menyarankan agar pemerintah memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada calon peminjam. Ada pula yang menyarankan melibatkan tokoh masyarakat dalam proses seleksi agar penerima benar-benar layak dan siap mengelola pinjaman.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk tidak hanya memahami pentingnya literasi keuangan syariah melalui pembukaan rekening bank syariah, tetapi juga menjadi sarana refleksi atas dampak program bantuan keuangan seperti KUR. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong perubahan sosial berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan yang sehat, penggunaan dana pinjaman secara produktif, serta munculnya keterlibatan tokoh masyarakat dalam mendampingi program-program ekonomi kerakyatan agar tepat sasaran. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, hal ini sejalan dengan pendapat Suharto (2005) bahwa suatu program akan gagal mencapai tujuannya apabila tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat sasaran. Dalam konteks ini, penyaluran KUR tanpa verifikasi yang tepat dapat memicu dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali mekanisme seleksi penerima KUR agar tidak terjadi penyalahgunaan dana atau tidak tepat sasaran.



Gambar 1. foto bersama pemateri



Gambar 2. penyerahan sertifikat kepada pemateri

KESIMPULAN

Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa meskipun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dikenal secara luas oleh masyarakat (100% responden mengetahui program ini), implementasinya di tingkat akar rumput masih belum optimal. Sebagian besar penerima (85,7%) telah mengakses dana KUR, namun 71,4% di antaranya menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, bukan untuk pengembangan usaha sebagaimana tujuan awal program. Akibatnya, 85,7% responden merasa kondisi ekonomi mereka justru memburuk, dan mayoritas mengalami kesulitan dalam membayar cicilan. Ketidaktepatan sasaran penerima serta kurangnya pendampingan usaha menjadi faktor dominan dalam penyimpangan ini.

Dampak pengabdian masyarakat ini terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan dan penggunaan dana pinjaman secara produktif. Kegiatan ini juga membuka ruang diskusi kritis bagi masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan program KUR di wilayah mereka, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya literasi keuangan syariah yang direalisasikan melalui pembukaan rekening bank syariah. Dalam jangka panjang,



diharapkan muncul perubahan sosial berupa peningkatan tanggung jawab keuangan, penguatan kapasitas usaha kecil, serta keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam pengawasan program bantuan ekonomi.

Keterbatasan kegiatan ini antara lain adalah jangkauan peserta yang masih terbatas pada komunitas tertentu, serta belum adanya tindak lanjut sistematis dalam bentuk pelatihan kewirausahaan lanjutan atau program pendampingan usaha secara rutin. Selain itu, waktu pelaksanaan yang relatif singkat membatasi proses pendalaman analisis sosial dan partisipasi yang lebih luas.

Rekomendasi ke depan, perlu dilakukan penguatan sistem verifikasi dan seleksi calon penerima KUR dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa agar penyaluran lebih tepat sasaran. Lembaga penyalur dana juga perlu menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha dan literasi keuangan sebelum pencairan dana dilakukan. Pendampingan berkelanjutan serta evaluasi rutin terhadap penggunaan dana juga penting untuk menjamin bahwa KUR benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar sarana konsumsi jangka pendek.

REFERENSI

- Anggraeni,I., Rahayu,A. (2024). Pengaruh penyaluran kredit usaha rakyat (kur) terhadap produktivitas umkm dan pendapatan umkm penerima kur pada pt bank mandiri kcm pameungpeuk banjaran. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA*. 15(1), 89–102.
- Asriyani N. Taha,N.,Hadady,N.,Taslim.,F (2022). Pengaruh pinjaman kredit usaha rakyat (kur) dan modal sendiri terhadap pendapatan (umkm) di kabupaten halmahera selatan. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*.3(1).399–412.
- Hastin, M. (2023). *Analisis proses pengajuan kredit usaha rakyat (kur) bank negara indonesia (persero) tbk kcu sungai penuh tahun 2022*. *Al fiddhoh* 4(2), 96–106.
- Ika S., Nurhidayat,R., dan Mutaqin (2007). *KREDIT USAHA RAKYAT (KUR): “INDONESIAN WAY” UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT INDONESIA*. Peneliti BKF pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementerian Keuangan RI.
- Suginam., Rahayu,S., Purba,E (2021). Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Untuk Pengembangan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*. 3(1),21–28.
- Utha, M. A., Arif, A., & Budisusetyo, H. (2019). Analisis Pengaruh Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap Profitabilitas Bank Penyalur Kur Di Indonesia. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*. 8 (2). <https://doi.org/10.25105/jipak.v8i>
- Widodo, S., & Widiatmanti, H. (2024). *Analisis Model Kebijakan Program Penyaluran “ KUR ” dalam Rangka Meningkatkan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku “ UMKM”* . *Jurnal kajian ilmiah perpajakan indonesia* 6(1), 67–94.
- Yusnita, R. T., & Fitriadi, B. W. (2019). Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Umkm Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(2).